

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:
DEFITRIZON
BP/NIM: 2004/48923

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2009**

ABSTRAK

DEFITRIZON (2004/48923) : Faktor-faktor penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Hasdi Aimon, Msi dan Ibu Dra. Hj. Mirna Tanjung, MS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: faktor-faktor apa saja penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel-variabel penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang antara lain adalah tingkat pendidikan, keterampilan, budaya kemiskinan dengan indikator (1) menyerah pada nasib (2) mobilitas antar pekerjaan (3) apatis (4) tidak terintegrasi dengan masyarakat luas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif, dimana data penelitian ini adalah data primer yang diolah dengan menggunakan analisis statistika. Populasi penelitian adalah seluruh gelandangan dan pengemis yang tersebar pada 11 kecamatan di Kota Padang yang berjumlah 823 orang. Teknik pengambilan sampel adalah insidental sampling, yaitu sebanyak 89 gelandangan dan pengemis. Teknik analisis data yaitu: (1) analisis deskriptif (2) analisis faktor.

Hasil penelitian ini memperlihatkan faktor-faktor penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang adalah menyerah pada nasib merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang paling besar, dengan nilai varians 14,726%, yang berarti bahwa faktor menyerah pada nasib mempengaruhi jumlah gelandangan dan pengemis sebesar 14,726%, mobilitas antar pekerjaan dengan nilai varians 11,011%, semangat hidup sebesar 10,348%, faktor pandangan hidup sebesar 10,317%, faktor pendidikan dan keterampilan sebesar 9,597%, faktor apatis sebesar 5,896%, dan faktor pemerintah sebesar 5,100%.

Penulis menyarankan supaya masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk memberantas penyakit masyarakat seperti gelandangan dan pengemis, dan dicarikan solusinya dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kerja serta pengayoman kepada gelandangan dan pengemis untuk memperoleh keterampilan yang dapat dikembangkan, sehingga bisa membuka lapangan usaha baru.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “Faktor-faktor penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hasdi Aimon, Msi dan Ibu Dra. Hj Mirna Tanjung, Ms selaku pembimbing I dan II yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih tidak lupa penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Amar B, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah memberi izin pada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi.
3. Bapak Drs. Akhirmen M.Si dan Ibu Melti Roza Adry, SE sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang memberikan sumbangan pikirannya selama perkuliahan demi terwujudnya

skripsi ini, serta karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah membantu dalam bidang administrasi.

5. Teristimewa penulis persembahkan untuk Orang Tua tercinta, serta semua keluarga yang telah memberikan dorongan baik moril maupaun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman angkatan 2004 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Teman-teman Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyiaran Kampus (UKKPK) Universitas Negeri Padang.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhir kata dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Padang, Maret 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori.....	9
1. Teori Tentang Kemiskinan	9
2. Konsep Keterampilan	21
3. Konsep Budaya Kemiskinan.....	22
4. Tingkat Pendidikan	28
5. Pengertian Gelandangan dan Pengemis	30
B. Penelitian yang Relevan	31
C. Kerangka Konseptual	31

Halaman

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel	33
D. Jenis Data Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Instrumen Penelitian	36
G. Defenisi Operasional	40
H. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	47
2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	50
3. Analisis Faktor	63
B. Pembahasan	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat Tahun 1999-2007	3
2. Distribusi Masyarakat Miskin Kota Padang Tahun 2005	4
3. Tingkat Pendidikan Kota Padang Tahun 2006	5
4. Jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Padang Tahun 2007	6
5. Jumlah gelandangan dan pengemis per Kecamatan di Kota Padang	34
6. Hasil Uji Validitas	34
7. Jumlah Penduduk Kota Padang Tahun 2002-2006	49
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	50
9. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	51
10. Distribusi Frekuensi tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis di Kota Padang Tahun 2008	52
11. Distribusi Keterampilan pada Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang	55
12. Distribusi Menyerah Pada Nasib	56
13. Distribusi Mobilitas Antar Pekerjaan	59
14. Distribusi Apatisme	60
15. Distribusi Tidak Terintegrasi dengan Masyarakat Luas	61
16. Ringkasan Hasil Penelitian Budaya Kemiskinan	63
17. Anti Image Correlation < 0,5	64
18. Communalities	65
19. Penentuan Jumlah Faktor	66
20. Identifikasi Faktor	68
21. Indikator yang tidak termasuk dalam hasil Analisis	69
22. Indikator Menyerah pada Nasib	70
23. Indikator Mobilitas Antar Pekerjaan	72
24. Indikator Semangat Hidup	74
25. Indikator Pandangan Hidup	75
26. Indikator Pendidikan dan Keterampilan	76
27. Indikator tidak Terintegrasi dengan Masyarakat Luas	78
28. Indikator Apatisme	79
29. Indikator Pemerintah	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Lingkaran Setan Kemiskinan.....	18
2. Keterbelakangan Sumber Daya Alam.....	19
3. Kerangka Konseptual.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Uji Validitas Reabilitas	88
Analisa Faktor	114
Izin Penelitian	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional selalu dilandasi oleh tujuan untuk penciptaan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Penciptaan tujuan dimaksud diwujudkan melalui berbagai proses pembangunan di segala bidang yang saling terkait dan saling menunjang satu sama lain sebagai bagian dari pembangunan nasional. Salah satu diantaranya adalah “Pembangunan Kesejahteraan Sosial”.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Edi Suharto, 2002).

Fenomena merebaknya gelandangan dan pengemis di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi gelandangan dan pengemis memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, baik keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib gelandangan dan pengemis tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal kalau kita melihat lebih dalam gelandangan dan pengemis adalah saudara kita, mereka ingin hidup lebih baik, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Sebagai wujud dari upaya masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis, berbagai kegiatan pemberdayaan yang bersumber daya masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis telah dilakukan diberbagai wilayah di Indonesia.

Peran Pemerintah Daerah memang sangat sentral dilihat dari sisi aksesibilitas fisik maupun nonfisik gelandangan dan pengemis. Kondisi riil para gelandangan dan pengemis selama ini dinilai belum mendapat kesempatan yang setara dengan masyarakat umum lainnya. Bahkan masyarakat pada umumnya masih belum bisa menerima bahwa adanya ketimpangan antara si kaya dengan si miskin, hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, serta konsumsi rata-rata perhari yang sangat kurang.

Kemiskinan bisa membuat orang mencari nafkah dengan cara gelandangan dan mengemis karena latar belakang yang membuat mereka terpaksa menjalaninya, pendidikan yang rendah, lingkungan, kesempatan kerja, pendapatan. Banyak mereka tidur di emperan toko maupun tidur di jalanan karena tak mampu membiayai kebutuhan sehari-hari dan mengemis dengan cara ini mereka bisa hidup dengan pendapatan yang pas-pasan, hal ini meresahkan masyarakat. Peran pemerintah dalam hal ini dibutuhkan untuk bisa mengarahkan kepada hal yang baik demi kelangsungan pembangunan di kota maupun di negara berkembang.

Gelandangan dan pengemis yang terjadi saat ini merupakan suatu penyakit masyarakat yang harus di tuntaskan dan dicari solusinya, masalah yang timbul dari gelandangan dan pengemis ini akan mengakibatkan garis kemiskinan yang meningkat, hal inilah yang harus diperhatikan oleh kalangan

masyarakat dan pemerintah. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat digambarkan seperti Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat
Tahun 1999-2007**

Tahun	Jumlah Penduduk miskin (Ribu Orang)	Perkembangan Penduduk Miskin (%)
1999	601.5	-
2000	482.5	-19.79
2001	643.3	33.33
2002	496.4	-22.84
2003	501.1	0.95
2004	472.4	-5.79
2005	482.8	2.20
2006	587.7	21.73
2007	529.3	-9.94
Rata-rata		-0.02

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 1999-2007

Berdasarkan pada Tabel 1, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada tahun 1999 berjumlah 601,5 ribu orang, dan kemudian pada tahun 2000 mengalami penurunan menjadi 482,5 ribu orang (-19,79 %), dan pada tahun 2001 kembali terjadi kenaikan secara signifikan yaitu 643,3 ribu orang (33.33 %), dan pada tahun 2002 mengalami penurunan menjadi 496,4 ribu orang (-22.84%). Sedangkan untuk tahun 2003 sampai pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya tidak berarti dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat mencapai 587.7 ribu orang (21.73%). Sedangkan pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat menurun dari tahun sebelumnya sebesar 529.3 ribu orang (-9.94%). Sebagian dari jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat terdapat di Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang telah melakukan beberapa usaha untuk menurunkan jumlah penduduk miskin atau meningkatkan keluarga prasejahtera menjadi keluarga sejahtera melalui kegiatan jangka pendek untuk menyelamatkan hidup masyarakat. Untuk mengatasi masalah kemiskinan pada tahun 2000 dilakukan dalam bentuk program kompensasi seperti program pengurangan subsidi bahan bakar minyak dalam bentuk kegiatan dana kompensasi sosial (DKS) dan pada tahun 2001 dalam bentuk program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi (PPDPSE) dan tahun 2002 dalam bentuk program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS BBM). Berikut pada Tabel 2 dapat dilihat distribusi penduduk miskin di Kota Padang berdasarkan Kecamatan:

Tabel 2. Distribusi Masyarakat Miskin Kota Padang Tahun 2005

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah keluarga Miskin (jiwa)	Jumlah penduduk miskin	Penduduk miskin (%)
1.	Lubuk Begalung	97.577	22.401	6.564	31.139	3.19
2.	Kuranji	110.336	25.025	5.520	27.616	2.50
3.	Padang Timur	83.165	21.070	3.454	16.605	1.99
4.	Pauh	50.213	11.570	2.231	11.429	2.27
5.	Padang Utara	72.778	19.331	2.357	11.251	1.54
6.	Padang Selatan	60.033	14.233	3.425	16.159	2.69
7.	Bungus Teluk Kabung	23.201	5.384	1.817	8.821	3.8
8.	Koto Tengah	146.130	30.909	9.584	33.481	2.47
9.	Padang Barat	59.668	15.124	2.677	11.739	1.96
10.	Nanggalo	55.680	13.214	1.481	7.599	1.39
11.	Lubuk Kilangan	40.546	9.662	2.010	9.215	2.27
	Jumlah	799.327	187.923	38.120	185.054	26.04

Sumber : Bappeda Kota Padang, 2006

Tabel 2 di atas, menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin Kota Padang yang paling terbesar adalah Kecamatan Koto Tengah sebanyak 33.481

jiwa dengan persentase 2.47. Sedangkan Kecamatan Nanggalo pada tahun 2005 jumlah penduduk miskinnya adalah 9.215 jiwa dengan persentase 1.39.

Jumlah masyarakat miskin yang tinggi, diakibatkan juga dengan tingkat pendidikan yang rendah dari penduduk Kota Padang yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Padang Tahun 2006

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa (jiwa)	Persentase(%)
1	SD Negeri dan Swasta	94.397	46
2.	SLTP Negeri dan Swasta	17.202	8
3.	SMU dan SMK	21.986	11
4	Perguruan tinggi	70.430	35
Jumlah		204.015	100

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

Tabel 3 di atas menjelaskan bahwa tingkat pendidikan paling banyak di Kota Padang adalah SD, sebanyak 94.397 orang atau sebesar 46%, untuk tingkat pendidikan SLTP sebanyak 17.202 orang, atau sebesar 8 %, SMU dan SMK sebesar 21.986 orang atau sebesar 11%, sedangkan untuk tingkat Perguruan Tinggi sebesar 70.430 orang yaitu sebesar 35%.

Dari sini bisa kita lihat pertumbuhan kemiskinan juga di sebabkan oleh tingkat pendidikan yang mengakibatkan masyarakat mencari nafkah dengan menjadi gelandangan dan pengemis, dan juga faktor ekonomi keluarga, kebutuhan hidup, pola pikir yang terbatas karena pendidikan yang rendah, juga adanya suatu faktor lingkungan, yaitu budaya kemiskinan pada diri mereka, dan juga minat atau keinginan yang terbatas, hal ini supaya di cari solusinya oleh pemerintah untuk mengatasi pola pikir masyarakat yang masih minim tersebut.

Tabel 4. Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang Tahun 2007

No	Kecamatan	Gelandangan		Pengemis		Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	wanita	
1	Bungus Teluk Kabung	11	2	90	132	235
2	Pauh	5	3	13	24	45
3	Padang Selatan	7	5	28	16	56
4	Padang Barat	7	5	28	16	56
5	Nanggalo	16	8	10	7	41
6	Koto Tengah	5	7	29	106	147
7	Kuranji	4	3	27	27	61
8	Lubuk Begalung	13	18	15	16	62
9	Lubuk Kilangan	5	7	11	10	33
10	Padang Utara	17	9	12	10	48
11	Padang Timur	10	2	21	6	39
	Jumlah	100	69	284	370	823

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Padang. 2007

Tabel 4 di atas menjelaskan bahwa kecamatan yang paling banyak jumlah gelandangan dan pengemisnya adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebanyak 235 orang. Sedangkan Kecamatan Lubuk Kilangan pada tahun 2007 jumlah gelandangan dan pengemisnya paling sedikit, sebanyak 33 orang.

Masalah Kemiskinan merupakan masalah Sumber Daya Manusia, Menurut Tjiptoherijanto (1997: 78), setidaknya ada dua masalah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia:

1. Masih belum berkembang (Under Development) Sumber Daya Manusia.
Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan, konsumsi, dan penyediaan fasilitas kehidupan yang layak.
2. Masih belum dimanfaatkannya seluruh keterampilan dan kemampuan seluruh sumber daya secara optimal.

Berdasarkan fenomena dan fakta di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana tingkat pendidikan, kesempatan kerja, serta budaya kemiskinan gelandangan dan pengemis di Kota Padang, yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PADANG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pendidikan pada gelandangan dan pengemis di Kota Padang?
2. Bagaimana kesempatan kerja pada gelandangan dan pengemis di Kota Padang?
3. Bagaimana budaya kemiskinan pada gelandangan dan pengemis di Kota Padang?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, terlihat bahwa banyak faktor yang penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan penulis, maka penelitian ini dibatasi pada bagaimana tingkat pendidikan, kesempatan kerja, budaya kemiskinan pada gelandangan dan pengemis di Kota Padang

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Penulis sendiri dalam menambah pengetahuan dan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Sebagai pedoman bagi pengambil keputusan dalam rangka menanggulangi kemiskinan
3. Sebagai bahan bagi pengembangan ilmu, terutama ilmu ekonomi pembangunan, khususnya teori kemiskinan.
4. Bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam masalah sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL

A. KAJIAN TEORI

1 Kemiskinan

a. Teori Tentang Kemiskinan

Dalam konteks Indonesia, harus diakui bahwa disatu pihak memang terdapat kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor natural dan kultural, sebagaimana terjadi pada berbagai kelompok masyarakat lainnya di dunia, kemiskinan natural adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Selain itu, adanya kebiasaan hidup boros, tidak disiplin, dan enggan bekerja keras memang masih merupakan budaya yang cukup dominan dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Indonesia (Baswir, 1999: 22).

Kemiskinan yang dipandang dalam sudut material maka seseorang masuk kedalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar kehidupan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi (Rintuh, 2003: 200).

BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan ingin

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sedangkan BPS dan Depsos (2002: 3) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak.

Friedman (dalam Suharto, dkk, 2004: 6) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial meliputi:

- 1) Modal produksi atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan)
- 2) Sumber keuangan (pekerjaan, kredit)
- 3) Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial)
- 4) Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang dan jasa
- 5) Pengetahuan dan keterampilan
- 6) Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup

Menurut para ahli antara lain Andre Bayo Ala (dalam Arsyad, 1999: 237) kemiskinan itu bersifat Multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan itu meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan. Dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan itu termanifestasi dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-

dimensi kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran pada aspek lainnya. Dan aspek lainnya dari kemiskinan itu adalah bahwa yang miskin itu adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif.

Menurut Nugroho (2004: 165), kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural atau struktural. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati nilai dan norma dalam masyarakat.

Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah. Pada masyarakat berkembang, aspirasi dan persepsi bersifat terbatas dan semu, serta mengutamakan atau mementingkan pengambilan keputusan dalam horizon waktu yang pendek.

Dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan lemahnya kemandirian masyarakat. Senantiasa nampak ketergantungan atau eksploitasi oleh kelompok masyarakat satu terhadap masyarakat yang lain dan bermuara kepada keadaan, ketidakadilan atau kesenjangan.

Konsep kemiskinan mutlak yang digunakan BPS yaitu dengan membedakan penduduk miskin dengan tidak miskin adalah dengan menggunakan garis kemiskinan. Pada prinsipnya, garis kemiskinan adalah standar minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar minimum untuk makanan diukur dari pengeluaran untuk satu paket makanan (52 jenis komoditi) yang dapat menghasilkan energi sebanyak 2.100 kalori per orang per hari. Selanjutnya kebutuhan minimum bukan makanan diukur dari pengeluaran minimum untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang tahan lama dan jasa esensial lainnya. Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan diukur untuk keperluan per orang per bulan. Dengan demikian garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran rupiah untuk kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan per orang per bulan (garis kemiskinan BPS).

Adapun kriteria miskin menurut Biro Pusat Statistik (BPS) adalah:

- 1) Tempat tinggal kurang dari 8 m² perorang
- 2) Lantai terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan
- 3) Dinding dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester
- 4) Tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar
- 5) Sumber air minum berasal dari air sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan
- 6) Bahan bakar untuk memasak menggunakan kayu bakar/ arang/ minyak tanah
- 7) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam 1 kali perminggu
- 8) Hanya membeli satu stel pakaian baru sekali dalam setahun
- 9) Hanya sanggup makan satu atau dua kali sehari
- 10) Tidak sanggup membayar pengobatan di Puskesmas

- 11) Pendidikan tertinggi kepala keluarga hanya SD
- 12) Tidak memiliki tabungan minimal Rp 50.000,-

Kemiskinan umumnya ditandai oleh isolasi, berlokasi jauh dari pusat-pusat perdagangan, diskusi dan informasi, kurangnya nasehat dari penyuluh pertanian, kehutanan dan kesehatan serta pada banyak kasus juga ditandai dengan ketiadaan sarana bepergian. Kelompok masyarakat miskin amat rentan karena mereka tidak memiliki sistem penyangga kehidupan yang memadai. Kebutuhan kecil dipenuhi dengan cara menggunakan uangnya yang sangat terbatas jumlahnya, mengurangi konsumsi, barter, pinjam dari teman dan pedagang. Mereka juga mengalami ketidakberdayaan yang ditandai dengan diabaikannya mereka oleh hukum, ketiadaan bantuan hukum bagi mereka, kalah dalam kompetisi mencari kerja dan mereka pun tidak memperoleh pelayanan publik yang optimal.

Kemiskinan kemudian lebih ditafsirkan sebagai suatu kondisi ketiadaan *access* pada pilihan-pilihan dan hak-hak yang seharusnya melekat dibidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan lingkungan hidup.

Konsep yang amat dekat dengan konsep kemiskinan adalah *impoverishment* (hal-hal menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi lebih miskin). Proses *impoverishment* adalah sebuah proses aktif menghilangkan akses dan hak-hak dasar yang secara sistematis direproduksi dan diciptakan oleh sejumlah mekanisme global seperti

kerusakan lingkungan hidup, kehancuran sumber daya rakyat, inflasi, pengangguran dan politik utang luar negeri. Proses inilah yang dikenal sebagai proses pelemahan (*disempowerment*) ekonomi, ekologi, sosial, politik dan kebudayaan khususnya bagi kelompok-kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.

b. Ukuran Kemiskinan

Dalam mengukur tingkat kemiskinan dengan cara yang paling sederhana adalah dengan menghitung jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan. Ukuran ini memperlihatkan jumlah orang atau keluarga yang tingkat pendapatannya belum mampu mencapai tingkat kebutuhan minimum. Disamping perkiraan mutlak, ukuran ini bisa juga dinyatakan secara relatif ini berarti ukuran tersebut memperlihatkan persentase jumlah penduduk miskin dibanding jumlah penduduk keseluruhan.

Widodo (dalam Wenni, 2007: 24) ukuran kemiskinan untuk menentukan tingkat kemiskinan diperoleh dari persamaan.

$$Y = \frac{q}{n} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

Y =Tingkat kemiskinan

q = Jumlah penduduk miskin

n = Jumlah penduduk

Menurut Arsyad (1999: 238) kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Oleh karena itu kemiskinan secara umum digolongkan ke dalam dua macam ukuran yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

1) Kemiskinan absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang tersebut bisa dikatakan miskin.

Dengan demikian kemiskinan dapat diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut, maksudnya untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 2000: 59).

Untuk membedakan penduduk miskin dengan tidak miskin menurut konsep kemiskinan absolut diperlukan garis pembatas yang disebut garis kemiskinan (*Property line*). Garis kemiskinan adalah garis

yang menyatakan tingkat perbandingan antara tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum.

Dalam konsep kemiskinan absolut, garis kemiskinan merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin. Perkiraan tentang garis kemiskinan secara garis besar dapat ditentukan dengan beberapa pendekatan antara lain dengan pendekatan kebutuhan minimum atau pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan kebutuhan gizi minimum atau komposisi pangan yang dibutuhkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Disamping itu terdapat pula pendekatan komposisi pengeluaran untuk bahan makanan. Pendekatan lain yang digunakan adalah garis kemiskinan international. Dibeberapa negara terdapat perkiraan garis kemiskinan resmi baik untuk merumuskan kebijaksanaan kesejahteraan sosial maupun penyusunan perencanaan pembangunan.

c. Penyebab dan Solusi Kemiskinan

1. Penyebab Kemiskinan

Hardiman dan Midgley, dalam Mudrajat, Kuncoro (2002) kemiskinan massal yang terjadi di banyak negara yang baru saja merdeka setelah Perang Dunia II memfokuskan pada keterbelakangan dari perekonomian tersebut sebagai akar masalahnya. Penduduk negara miskin karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang

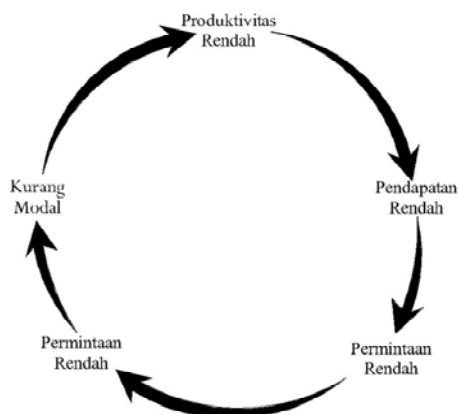
subsisten, metode produksi yang tradisional, yang seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan.

Sharp, et.al, dalam Mudrajat, Kuncoro (2002) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya akan rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

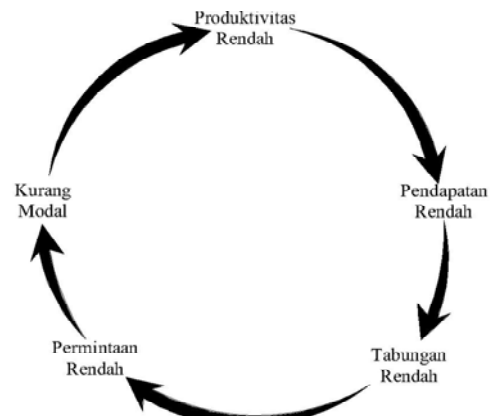
Ragnar Nurkse, dalam M.L. Jhingan (2000) menjelaskan ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori “lingkaran setan kemiskinan” (*vicious circle of poverty*), yang mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat.

Lingkaran setan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan

perekonomian. Lingkaran setan tersebut kalau dilihat dari *sudut permintaan* dapat dijelaskan sebagai berikut: rendahnya tingkat pendapatan nyata menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah, sehingga pada gilirannya tingkat investasi pun rendah. Tingkat investasi yang rendah kembali menyebabkan modal kurang dan produktivitas akan rendah. Inilah yang ditunjukkan dalam gambar 1.1 Produktivitas rendah tercermin di dalam pendapatan nyata yang rendah. Pendapatan nyata rendah berarti tingkat tabungan juga rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan tingkat investasi rendah dan modal kurang. Kekurangan modal pada gilirannya bermuara pada produktivitas rendah. Dengan demikian lingkaran setan itu lengkaplah pula kalau dilihat dari *sudut penawaran*. Lingkaran ini dilukiskan di dalam gambar 1.2. Tingkat pendapatan rendah, yang mencerminkan rendahnya investasi dan kurangnya modal, merupakan ciri umum kedua lingkaran setan tersebut.



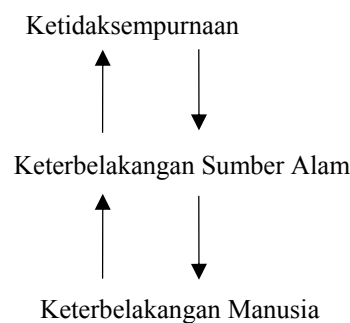
Gbr . 1.1 Sisi Permintaan



Gbr 1. 2 Sisi Penawaran

Sumber: M.L. Jhingan, 2000.

Lingkaran setan yang ketiga menyangkut keterbelakangan manusia dan sumber daya alam. Pengembangan sumber daya alam pada suatu negara tergantung pada kemampuan produktif manusianya. Jika penduduknya terbelakang dan buta huruf, langka akan keterampilan teknik, pengetahuan dan kewiraswastaan, maka sumber-sumber alam akan tetap terbengkalai, kurang atau bahkan salah guna. Pada pihak lain, Meier dan Baldwin, dalam bukunya *Economic Development*, Edisi I dan II, 1971, menguraikan keterbelakangan sumber daya alam ini menyebabkan keterbelakangan manusia. Karena itu, merupakan sebab sekaligus akibat keterbelakangan manusia, seperti pada gambar 2.3 berikut ini.



Gambar 2. Keterbelakangan Sumber daya alam

Sumber: M.L. Jhingan, 2000

“Kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi merupakan dua istilah yang sinonim. Suatu negara dikatakan miskin karena ia terbelakang. Ia terbelakang karena ia miskin, dan tetap terbelakang karena tidak mempunyai sumber yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan”

2 . Alternatif Solusi Kemiskinan

Berbagai model mobilisasi perekonomian pedesaan untuk memerangi kemiskinan, Nurkse, dalam Mudrajat, Kuncoro (2002) mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih belum didayagunakan (*idle*) dalam rumah tangga petani gurem agar terjadi pembentukan modal di pedesaan. Ide bahwa tenaga kerja yang masih belum didayagunakan pada rumah tangga petani kecil dan gurem merupakan sumber daya yang tersembunyi dan merupakan potensi tabungan.

Lewis, Fei dan Ranis, dalam Mudrajat, Kuncoro (2004) menitikberatkan pada transfer sumber daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar. Ide bahwa suplai tenaga kerja yang tidak terbatas dari rumah tangga petani kecil dapat meningkatkan tabungan dan formasi modal lewat proses pasar.

Schultz dan Mellor, dalam Michael P. Todaro (2000) menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor pertanian menjadi sektor yang memimpin. Model ini dikenal dengan Model Pertumbuhan Berbasis Teknologi (*Rural-Led Development*). Sektor pertanian di sini tidak hanya sebagai sumber pasok sumber daya (baik pangan, bahan baku, tenaga kerja, dan tabungan), namun sebagai sektor yang mampu meningkatkan permintaan atas produk pertanian dan non pertanian. Oleh

karena itu, mendukung proses pertumbuhan seimbang. Proses ini akan berhasil apabila 2 syarat ini terpenuhi, yaitu:

1. Kemampuan mencapai tingkat pertumbuhan output pertanian yang tinggi,
2. Menciptakan pola permintaan yang kondusif terhadap pertumbuhan.

2. Konsep Keterampilan

Keterampilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kecakapan , kemampuan, kecekatan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas. Keterampilan mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja, keterampilan ini akan diperoleh melalui pendidikan khusus seperti khusus keterampilan.

Menurut Hasanuddin, (1986: 52) menyatakan bahwa dengan adanya keterampilan, pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki seseorang akan memudahkan orang tersebut mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Makin tinggi keterampilan yang dimiliki seseorang, maka semakin mudah dan besar kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Keterampilan tenaga kerja dianggap sebagai faktor produksi atau variabel yang berubah-ubah.

Peranan tenaga manusia dalam produksi dan pembangunan ditentukan oleh jumlah dan mutu tenaga kerja yang tersedia untuk pelaksanaan berbagai usaha. Di Indonesia jumlah tenaga kerja dapat dikatakan cukup besar dan sebagian besar merupakan tenaga kerja yang tidak terdidik atau tidak terlatih.

Priyatno mengatakan (1985: 112) keterampilan adalah kecakapan khusus untuk mempergunakan cara-cara yang menyertai yang tepat dalam diri seseorang. Keterampilan ini secara relatif bersifat mental dan dapat pula bersifat motoris.

Maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan merupakan salah satu faktor utama penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Keterampilan dari diri seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, hal ini dikarenakan individu yang terampil dapat menggunakan pikirannya dengan kritis, efektif, efisien, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Budaya Kemiskinan

Kebudayaan adalah pengasingan dan terkikisnya harapan, sehingga menimbulkan suatu cara hidup yang berbeda dengan mereka yang tidak begitu miskin. Gerakan kebudayaan juga dapat diartikan sebagai keseluruhan upaya pengembangan swadaya masyarakat dalam mengatasi dan memenuhi kebutuhannya, dalam kerangka proses belajar terus menerus dan sesuai dengan pengalaman kesejahteraan serta peluang penerimaan masyarakat, ke arah transformasi perilaku aktual, struktur dan tata nilai kemasyarakatan (Jakti, 1994: 260)

Menurut Kluckhohn (dalam Koentjaraningrat, 1990: 190), menyatakan bahwa tiap sistem nilai budaya dalam tiap kebudayaan itu mengenai 5 masalah dasar dalam kehidupan manusia. Kelima masalah

dasar dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan bagi kerangka variasi sistem nilai budaya adalah:

a. Masalah mengenai hakikat dari hidup manusia

Ada kebudayaan yang memandang hidup manusia itu pada hakikatnya buruk, tetapi manusia dapat mengusahakan untuk menjadikannya suatu hal yang baik dan menggembirakan.

b. Masalah mengenai hakikat dari karya manusia

Ada kebudayaan yang memandang bahwa karya manusia pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup. Kebudayaan lain menganggap bahwa hakikat dari karya manusia itu untuk memberikannya suatu kedudukan yang penuh kehormatan dalam masyarakat. Sedangkan kebudayaan-kebudayaan lainnya menganggap hakikat karya manusia itu sebagai suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi.

c. Masalah mengenai hakikat dari kedudukan dalam ruang dan waktu.

Ada kebudayaan-kebudayaan yang memandang penting dalam kehidupan manusia itu pada masa lampau. Dalam kebudayaan-kebudayaan seperti itu orang akan lebih sering mengambil sebagai pedoman dalam tindakannya, contoh-contoh, dan kejadian-kejadian dalam masa lampau. Sebaliknya, ada banyak pula kebudayaan dimana orang hanya mempunyai suatu pandangan waktu yang sempit. Warga dari kebudayaan seperti itu tidak akan memusingkan

diri dengan memikirkan zaman yang lampau maupun masa yang akan datang.

- d. Masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitar

Ada kebudayaan-kebudayaan yang memandang alam sebagai suatu hal yang dahsyat, sehingga manusia pada hakikatnya dapat bersifat menyerah saja tanpa berusaha banyak. Sebaliknya, banyak pula kebudayaan lain yang memandang alam sebagai suatu hal yang dapat dilawan oleh manusia, dan mewajibkan manusia untuk selalu menaklukkan alam. Kebudayaan lain menganggap bahwa manusia hanya dapat berusaha mencari keselarasan dengan alam.

- e. Masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya

Ada kebudayaan-kebudayaan yang sangat mementingkan hubungan vertikal antara manusia dengan sesamanya. Dalam tingkah lakunya manusia yang hidup dalam suatu kebudayaan seperti itu akan berpedoman kepada tokoh-tokoh, pemimpin, orang-orang senior, atau orang-orang atasan. Kebudayaan lain lebih mementingkan hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Orang dalam suatu kebudayaan seperti itu akan sangat merasa tergantung kepada sesamanya, dan usaha untuk memelihara hubungan baik dengan tetangganya dan sesamanya merupakan suatu hal yang dianggapnya sangat penting dalam hidup. Kecuali ada banyak kebudayaan lain yang

tidak membenarkan anggapan bahwa manusia harus berdiri sendiri dalam hidupnya dan sangat mungkin mencapai tujuannya dengan bantuan orang lain sedikit mungkin.

Lewis (dalam Effendi, 1993: 203) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat nilai-nilai dari kebudayaan yang di anut oleh kaum miskin itu sendiri. Menurut Lewis kaum miskin di kota tidak terintegrasi dengan masyarakat luas, apatis dan cenderung menyerah pada nasib. Disamping itu, tingkat pendidikannya rendah serta tidak mempunyai daya juang dan kemampuan untuk memikirkan masa depan. Jelasnya kondisi kehidupan kaum miskin serba kontras dengan golongan elit kota.

Selanjutnya Lewis (dalam Effendi, 1993: 218) menyimpulkan bahwa keadaan yang serba menyimpang itu berakar dari kondisi lingkungan yang serba miskin yang cenderung diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, kaum miskin telah mensyaratkan nilai-nilai dan perilaku kemiskinan, akibatnya perilaku tersebut melanggengkan kemiskinan mereka. Berarti bahwa nilai-nilai dan perilaku terbentuk karena lingkungan kemiskinan.

Pendapat Bilarso (dalam Dani, 2005: 18) tentang kemiskinan yang disebabkan oleh keterkaitan dengan nilai-nilai budaya yang di anut masyarakat. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa nilai-nilai budaya sangat mempengaruhi kemiskinan seluruh masyarakat. Misalnya

bagaimana pandangan alam sekitarnya yang menyebabkan suatu masyarakat maju atau tertinggal.

Orang menjadi miskin karena tidak bekerja keras, boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa swasta, fatalitas, tidak ada hasrat berprestasi dan lain sebagainya. Orang-orang miskin adalah kelompok sosial yang mempunyai budaya sendiri. Budaya kemiskinan hanyalah semacam realistik dan situasional adaption pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Bila kondisi sosial ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka budaya kemiskinan segera pula ditinggalkan. (Swasono,dkk, 1987: 25).

Menurut Lewis (dalam Effendi, 1993: 203) indikator-indikator budaya kemiskinan adalah sebagai berikut:

a. Tingkat pendidikan

Dilihat dari faktor pendidikan, ada hubungan erat antara pendidikan rendah dan kemiskinan, sehingga faktor masukan tenaga kerja menjadi lemah dari segi produktifitas tenaga kerja miskin. Menurut Elfindri (2005: 12) faktor utama yang menyebabkan kemiskinan terutama disebabkan karena kelompok miskin tidak memiliki modal yang memadai. Kemudian diikuti dengan pendidikan dari kepala keluarga yang rendah, disamping pendidikan rendah tidak diikuti dengan penguasaan keterampilan untuk bekerja.

Sudarsono dan Jhigan (dalam Yeni, 200: 21), mengemukakan bahwa tingkat pendidikan ada hubungan dengan produktifitas kerja. Semakin tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat produktifitasnya. Kondisi ini antara lain disebabkan karena tingkat pendidikan merupakan salah satu saran yang dapat menambah dan membentuk pengetahuan seseorang untuk dapat mengerjakan sesuatu dengan hasil lebih cepat dan tepat.

Pendapat Samuel dan Nordhaus (dalam Yeni, 2001:25)

“Salah satu sebab kemiskinan adalah penduduk dan pengalaman. Kurangnya pendidikan merupakan salah satu rintangan terbesar sepanjang sejarah” .

b. Kecenderungan penduduk yang menyerah pada nasib

Lingkaran kemiskinan dapat diterangkan sebagi berikut: Oleh karena kemiskinan, maka produktifitas rendah dan pada gilirannya pendapatan menjadi rendah disebabkan kemiskinan membuat daya tawar maupun daya kerja lemah. Oleh karena produktifitas atau pendapatan rendah, maka kemiskinan timbul. Demikian seterusnya, lingkaran kemiskinan cenderung bertambah parah.

c. Mobilitas antar pekerjaan

Mobilisasi pekerjaan diartikan berganti jenis pekerjaan. Menurut Elfindri (2005) bahwa berbagai faktor internal sering diungkapkan rendahnya tingkat pengetahuan, dan seiring dengan itu disebabkan rendahnya mobilitas vertikal dan akan menyebabkan rendahnya

penguasaan modal sebagai akumulasi dari kemampuan mereka rendah dalam bentuk tabungan.

d. Apatisme

Brenan (dalam Effendi, 1993: 219) mengatakan bahwa bagi golongan miskin kota, jalan menuju ke atas seringkali dirintangi, sedangkan jalan menuju ke bawah terlalu mudah dilewati. Dengan kata lain, munculnya apatisme dikalangan masyarakat miskin lebih disebabkan oleh himpitan kehidupan yang berasal dari golongan elit kota yang berkehendak melansungkan tatanan yang sudah mapan.

e. Tidak terintegrasi dengan masyarakat lain

Menurut Nugroho (2004: 168) pelaksana pembangunan, pakar atau pihak yang tidak sabar sering dan cenderung menggunakan kemiskinan jenis kultural sebagai kambing hitam yang menghambat pekerjaannya, dan mengganggu jalannya pembangunan. Padahal bukan tidak mungkin keadaan kemiskinan lebih banyak disebabkan oleh kemiskinan struktural didalam negara yang dalam kelembagaannya tidak mengupayakan kemiskinan. Kelompok masyarakat miskin sering dibiarkan tidak memiliki akses yang sama dengan mereka terhadap sumber daya, seperti kredit, informasi dan faktor produksi lainnya.

4. Tingkat Pendidikan

Dalam *Dictionary Of Education* yang dikutip dalam Nawi (1993: 7), pendidikan didefinisikan sebagai berikut:

- a. Proses seseorang dalam mengembangkan kemampuan serta sikap dan tingkah laku dalam masyarakat tempat ia hidup
- b. Proses sosial yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan sekolah, sehingga diperoleh perkembangan individu yang optimal.

Menurut pendapat Kuntjoro (1994: 272), bahwa tingginya tingkat proporsi mereka yang berpendidikan dikalangan penduduk miskin, membuat mereka mungkin merasa tidak puas dengan kebutuhan sekarang. Secara umum, tingkat pendidikan keluarga berkorelasi dengan tingkat kemiskinan gelandangan dan pengemis, dimana tingkat pendidikan berkaitan dengan tingkat pendapatan dan penghasilan.

Pendidikan merupakan upaya untuk mengantarkan manusia kearah kedewasaan, melalui pendidikan anggota masyarakat mendapat kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur pola kehidupan. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan berarti membuka kesempatan ekonomis untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan persyaratan untuk meningkatkan martabat kehidupan manusia (Djojohadikusumo; 1999: 64). Sejalan dengan hal diatas, menurut Lains (1987: 7):

“ Pendidikan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya kualitas nonfisik. Kualitas nonfisik ini direfleksikan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang. Pengetahuan dan keterampilan ini menjadi bakal dalam bekerja dan berusaha, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan”.

Oleh karena itu, menurut Simanjuntak (1992: 8), peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan mempunyai kaitan erat dengan peningkatan taraf hidup manusia. Secara teoritis, menurut Simanjuntak (1998: 13):

“Tingkat pendidikan dan keterampilan kerja akan mempengaruhi tingkat pendayagunaan tenaga kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan, sebaliknya tenaga kerja dengan pendidikan tinggi akan mempunyai produktivitas yang tinggi dan karenanya akan mendapatkan balas jasa (upah) yang tinggi”.

Oleh karena itu, pendidikan merupakan langkah yang paling strategis dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan yang berkaitan erat dengan pendapatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil peluang untuk menjadi miskin dan sebaliknya.

5. Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma, kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup menggembara di tempat-tempat umum.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Menurut **PERDA** (tahun 2007) Tentang Penaggulangan gelandangan dan pengemis.

B. Penelitian yang Relevan

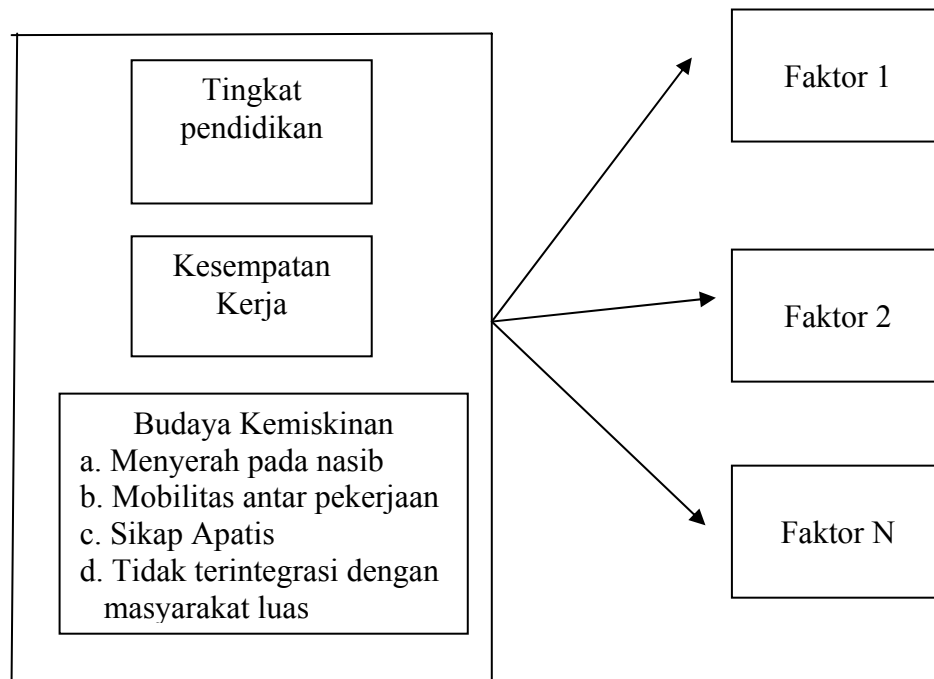
Penelitian yang dilakukan oleh Nora Yunita (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Budaya kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Payakumbuh Utara, menemukan bahwa dari lima indikator, tiga indikator dinyatakan positif, yaitu tingkat pendidikan masyarakat miskin adalah relatif rendah, yaitu 80% responden memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah, mobilitas antar pekerjaan rendah, dan masyarakat miskin tidak terintegrasi dengan masyarakat luas.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan keterkaitan maupun antara variabel yang diteliti berpijak dari teori yang dikemukakan di atas.

Sebagaimana yang dikemukakan pada bagian terdahulu, yang termasuk ke dalam faktor-faktor penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang adalah tingkat pendidikan, tingkat kesempatan kerja, dan budaya kemiskinan dari masyarakat itu sendiri.

Berikut ini dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gbr. 3 Kerangka Konseptual dari Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya
Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis faktor yang menjadi penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang menunjukkan bahwa dari indikator-indikator yang menentukan, dijabarkan menjadi delapan faktor yaitu : (1) Faktor menyerah pada nasib, (2) Faktor mobilitas antar pekerjaan, (3) Faktor semangat hidup, (4) Faktor pandangan hidup, (5) pendidikan dan keterampilan, (6) Faktor tidak terintegrasi dengan masyarakat luas, (7) Faktor apatisisme, (8) Faktor pemerintah.
2. Dari delapan faktor yang menjadi penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang, faktor menyerah pada nasib merupakan faktor yang mempunyai pengaruh paling besar, dengan nilai varian sebesar 14,726%, yang berarti bahwa faktor menyerah pada nasib mempengaruhi timbulnya Gelandangan dan Pengemis sebesar 14,185%, faktor mobilitas antar pekerjaan sebesar 11,011%, faktor semangat hidup sebesar 10,348%, faktor pandangan hidup sebesar 10,317%, faktor pendidikan dan keterampilan sebesar 9,597%, faktor tidak terintegrasi dengan masyarakat luas sebesar 5,991%, faktor apatisisme sebesar 5,896%, faktor partisipasi pemerintah sebesar 5,100%.

3. Dari delapan faktor penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang, memberikan sumbangan persentase kumulatif variance sebesar 72,986%. Artinya bahwa delapan faktor tersebut dapat menjelaskan indikator-indikator yang penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Padang adalah sebesar 72,986%. Sedangkan sisanya sebesar 27,014% dijelaskan oleh indikator lain yang tidak termasuk dalam indikator yang peneliti teliti.

B. Saran

Dalam upaya menekan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Padang, maka pemerintah Kota Padang perlu memperhatikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis di kota Padang, diantaranya :

1. Tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis masih relatif rendah, sedangkan pendidikan sangat penting untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Untuk itu disarankan kepada pemerintah maupun masyarakat agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gelandangan dan pengemis melalui berbagai bentuk pelatihan, penyuluhan atau melalui berbagai media yang memungkinkan yang pada akhirnya dapat menghindarkan diri dari kemiskinan.
2. Budaya Kemiskinan gelandangan dan pengemis masih sangat tinggi, yang di tandai dengan tingkat pendidikan rendah, menyerah pada nasib, mobilitas antar pekerjaan rendah, sikap apatis, dan tidak terintegrasi dengan masyarakat luas, diharapkan kepada gelandangan dan pengemis

dengan dibimbing oleh pemerintah agar menghilangkan budaya kemiskinan agar bisa meningkatkan kesejahteraan hidup.

3. Karena kesempatan kerja yang rendah, diharapkan kepada pemerintah dan dibantu oleh masyarakat untuk memberikan pelatihan-pelatihan kerja, pembinaan dan pengayoman kepada gelandangan dan pengemis untuk memperoleh keterampilan yang dapat dikembangkan, sehingga bisa membuka lapangan usaha baru.
4. Untuk Peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang gelandangan dan pengemis hendaknya memasukkan variabel lain selain variabel yang penulis teliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirmen, (2004). *Buku Ajar Statistika I*. FIS-UNP. Padang
- Ananta, Aris (1992). *Ciri Demografi Kualitas Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: FE-UI.
- Arsyad, Lincolin. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN:Yogyakarta.
- Ayu, Mega. (2006). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kota Padang*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Bappeda Sumbar, (2007). *Penyempurnaan Data Kemiskinan 2007*. Padang.
- Cahyat, Ade. (2004). *Governance Brief*. (online), (www.google.com).
- Cetubig, I.P. (1997). *Kemiskinan dari Segi Pendekatan Sosial Budaya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Dani, Mira. (2005). *Faktor-faktor Penentu Kemiskinan Nelayan di Kec. Koto XI Tarusan Kab.Pessel*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Padang** (2007). Padang.
- Effendi, Tadjudun Noer. (1993). *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar. (1999). *Ekonometrika Dasar, Terjemahan Oleh Zumarno Zain*. Erlangga: Jakarta.
- Idris. (2004). *Model Analisis Data Kuantitatif Dengan Program SPSS*. Penerbit MM UNP: Padang.
- Irawan, Prasetya. (1999). *Logika dan Prosedur Penelitian*. STIA-LAN Press: Jakarta.
- Jhingan, ML. (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- J. Supranto. (2006). *Analisis Multivariat: arti dan interpretasi*. PT. Gramedia: Jakarta.